

KEEFEKTIVAN KEBIJAKAN *E-LEARNING* DI SEKOLAH DASAR PADA MASA COVID-19

Nurkolis¹, Muhdi²

¹Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang

²Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang

Email: nurkolis@upgris.ac.id

ABSTRACT

The scope of this research is related to learning from home policies with e-learning in Sekolah Dasar (SD) during the Covid-19 period. The purpose of the research is to describe the effectiveness of e-learning policy formulation in SD and to describe the quality of e-learning implementation in SD. The research method used is policy research with a quantitative and qualitative mixed approach. The research respondents were 6.279 SD teachers in 35 Regencies and Cities in Central Java Province. The study was conducted in April 2020 by distributing questionnaires through Google form with a confidence level of 95%. The data was also analyzed from 15 policy documents issued by the Government, Regional Government, Provincial Education Office, and Regency or City Education Office. Quantitative data is processed by the Pivoting program in MS Excel and qualitative data is processed by the Nvivo12 + program. The results showed that e-learning policy formulation was effective either in terms of policy elements or policy objectives. The policy implementation was not effective seen from the learning interaction activities, the media used, the platform chosen, the methods used, and the evaluation used by the teachers.

Keywords: *Covid-19, internet; smartphone; communication and information technology; education technology.*

ABSTRAK

Ruang lingkup penelitian ini adalah terkait kebijakan belajar di rumah secara *e-learning* di Sekolah Dasar (SD) selama masa Covid-19. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan keefektivan rumusan kebijakan *e-learning* di SD dan mendeskripsikan keefektivan implementasi *e-learning* di SD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif. Responden penelitian adalah guru SD sebanyak 6.279 orang di 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada bulan April 2020 dengan menyebarkan angket melalui *google form* dengan tingkat kepercayaan 95%. Data juga dianalisis dari 15 dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi, serta Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Data kuantitatif diolah dengan program Pivoting di MS Excel dan data kualitatif diolah dengan program Nvivo12+. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan kebijakan *e-learning* sudah efektif dilihat dari unsur kebijakan dan tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan *e-learning* belum efektif dilihat dari aktivitas interaksi pembelajaran, media yang digunakan, *platform* yang dipilih, metode yang digunakan, dan evaluasi yang digunakan guru.

Kata kunci: *Covid-19, internet; smartphone; teknologi komunikasi dan informasi; teknologi pendidikan.*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 19 yang selanjutnya disebut Covid-19 telah menjadi pandemi dan memaksa mengubah cara hidup manusia termasuk cara belajar yang semula dilaksanakan secara tatap muka berubah ke *e-learning*. Kebijakan *e-learning* dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Surat Edaran (SE) No. 4/2020 bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran dalam jaringan atau Daring (Kemendikbud, 2020)¹. Daring disebut juga *online learning*, *electronic learning*, atau *e-learning*.

SE Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI merupakan kebijakan pendidikan. Menurut (Tilaar dan Nugroho, 2009: 264), kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah instrumen yang dibuat oleh pemerintah demi terwujudnya perubahan yang lebih baik dengan menutupi kebijakan sebelumnya yang tidak cocok dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan (Madjid, 2018: 12-13).

Dilihat dari bentuk kebijakan, SE Mendikbud tersebut termasuk regulasi yang didasarkan pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait penanganan Covid-19. Menurut (Nugroho, 2017: 171), kebijakan publik memiliki beberapa tujuan seperti distributif atau absortif, regulatif atau deregulatif, serta dinamisasi atau stabilitasi. Menurut (Madjid, 2018: 16-21), kebijakan pendidikan memiliki tiga unsur pokok yaitu unsur masalah, unsur tujuan, dan unsur cara pemecahan masalah.

Teori belajar dan teknologi pendidikan telah berkembang pesat sehingga menuntut perubahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut (Huang, Spector, dan Yang, 2019: 43-44), sejak tahun 1980-2020 telah berkembang teknologi internet, multimedia interaktif, *MOOCs*, *Social Computing*, *Cloud Computing* yang digunakan dalam pendidikan. Sehingga teori pendidikan yang diterapkan telah berubah dari teori konstruktivisme ke teori konektivisme. Bahkan menurut (Rayes dan Salam, 2019) saat ini merupakan era *internet of*

things (IoT) yaitu adanya jaringan yang terdiri dari berbagai elemen dengan kecerdasan perangkat lunak, sensor, dan konektivitas di mana-mana melalui internet. Namun kenyataan para pelaku pendidikan di Indonesia belum banyak memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu jika guru SD tidak mengikuti perkembangan teknologi pendidikan, terutama penggunaan *e-learning* maka akan tertinggal dari perkembangan teknologi.

Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) perlu menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun kenyataannya masih banyak guru yang belum menguasai TIK untuk pembelajaran. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penguasaan TIK hanya 60% masuk kategori cukup sementara 40% tidak menguasai TIK untuk pembelajaran (Pribowo, 2017). Penelitian yang terbaru (Pribowo, 2020) menyatakan bahwa 92% guru menyatakan media teknologi informasi menyediakan perangkat pembelajaran yang lebih menarik, variatif, dan komunikatif. Apalagi penggunaan *e-learning* di SD dapat meningkatkan motivasi belajar siswa SD seperti hasil penelitian (Ibrahim dan Suardiman, 2014), dan (Sobron, dkk, 2019). Sayang sekali hingga saat ini belum ditemukan penelitian terkait kebijakan implementasi *e-learning* apalagi dikaitkan dengan pandemi Covid-19.

Maka permasalahan penelitian dalam artikel ini adalah (a) bagaimanakah efektivitas rumusan kebijakan *e-learning* di SD, dan (b) bagaimanakah kualitas implementasi *e-learning* di SD. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk (a) mendeskripsikan efektivitas rumusan kebijakan *e-learning* di SD, dan (b) mendeskripsikan kualitas implementasi *e-learning* di SD.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan campuran kuantitatif-kualitatif. Penelitian dilakukan pada bulan April-Mei 2020 di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mencakup 6.279 orang guru SD dengan tingkat kepercayaan 95%. Teknik pengumpulan data menggunakan angket melalui *google form* dan dokumen kebijakan yang digunakan sebanyak 15 buah dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk penyelenggara teknis pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten/Kota. Data kuantitatif dianalisis dengan Program Pivoting di Excel dan data kualitatif dianalisis dengan *software* Nvivo 12+.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena sejak adanya kebijakan *e-learning* di terutama di SD sebagai dampak pandemi Covid-19 belum ada satu pun penelitian yang mengungkapkan efektivitas rumusan kebijakan *e-learning*, kualitas implementasi kebijakan *e-learning*, dan kendala-kendala implementasi *e-learning*. Oleh karena itu hasil penelitian ini merupakan temuan baru dan akan memberi kontribusi yang penting dalam implementasi *e-learning* di SD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keefektivan Rumusan Kebijakan *E-learning* di SD

Efektivitas rumusan kebijakan *e-learning* ini dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur pokok kebijakan pendidikan dan tujuan kebijakan pendidikan. Menurut (Madjid, 2018: 16-21), kebijakan pendidikan memiliki tiga unsur pokok yaitu unsur masalah, unsur tujuan, dan unsur cara pemecahan masalah. Menurut (Nugroho, 2017: 171), kebijakan publik memiliki beberapa tujuan seperti distributif atau absortif, regulatif atau deregulatif, serta dinamisasi atau stabilitasi.

Dari semua dokumen yang dianalisis terkait kebijakan *e-learning* ini telah memenuhi tiga unsur pokok kebijakan yaitu masalah, tujuan, dan pemecahan masalah. Masalah utamanya adalah perkembangan dan penyebaran Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan. Sementara itu tujuan kebijakan *e-learning* adalah melindungi kesehatan warga sekolah atau madrasah dari ancaman perkembangan dan penyebaran Covid-19. Sedangkan cara pemecahan masalah dengan memaksimalkan pemanfaatan UKS, menyediakan sarana kesehatan untuk cuci tangan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekolah, membatalkan ujian nasional, proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah dengan *e-learning*, mengatur ulang pelaksanaan ujian sekolah, mengatur ulang kenaikan kelas dan penerimaan peserta didik baru, mengatur ulang penggunaan dana bantuan operasional sekolah.

Dilihat dari tujuan kebijakannya, *e-learning* melalui SE Mendikbud No. 4/2020 telah memenuhi tujuan kebijakan regulatif sekaligus deregulatif. Menurut (Nugroho, 2017: 172) kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi yaitu mengatur agar kegiatan pembelajaran dilaksanakan dari rumah dengan *e-learning*. Juga diatur bahwa pembelajaran di rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup diantaranya mengenai Covid-19. Kebijakan ini sekaligus deregulatif karena disebutkan bahwa pembelajaran di rumah tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dalam rangka kenaikan kelas maupun kelulusan, tugas dan aktivitas belajar di rumah dapat bervariasi antarsiswa sesuai minat masing-masing siswa, dan hasil belajar siswa diberi umpan balik oleh guru secara kualitatif tanpa diharuskan memberi skor kuantitatif.

Kebijakan yang regulatif sekaligus deregulatif ini juga sudah dikeluarkan (Kemendikbud, 2020³) melalui SE No. 3/2020. Kebijakan regulatif tampak dari pernyataan “menginstruksikan kepada satuan pendidikan mengoptimalkan peran usaha kesehatan sekolah, memastikan ketersediaan sarana cuci tangan pakai sabun, memastikan kebersihan

ruangan”. Kebijakan deregulatif dari SE tersebut tampak dari pernyataan “memberikan ijin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang di satuan pendidikan, tidak memberlakukan hukuman bagi yang tidak masuk karena sakit, dan tidak memberlakukan kebijakan berdasar insentif berbasis kehadiran”.

Dampak Covid-19 yang memaksa para guru untuk menerapkan *e-learning* sesuai kebijakan Mendikbud ternyata menjadi motivasi guru untuk belajar menggunakan *e-learning*. Isian responden pada angket menunjukkan bahwa sebanyak 88% guru SD menyatakan termotivasi dan sangat termotivasi untuk belajar *e-learning* dan hanya 12% saja guru yang mengaku tidak termotivasi. Artinya kebijakan ini telah memenuhi tujuan kebijakan mendinamisasi atau menstabilisasi (Nugroho, 2017: 172). Kebijakan mendinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Kebijakan Mendikbud dan Menag telah menggerakkan sumber daya guru SD untuk lebih menguasai teknologi dalam pembelajaran. Para guru di era TIK, internet, sosial media, dan komputasi awan harus mampu menerapkan perkembangan teknologi dalam pembelajaran.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum ada guru SD yang pernah mendapatkan pelatihan *e-learning* dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama. Namun karena kondisinya terpaksa maka mereka harus melaksanakan *e-learning* karena tidak ada pilihan lain setelah adanya larangan mengumpulkan siswa. Berdasarkan angket terkait pengalaman guru SD melaksanakan *e-learning* sebanyak 70% guru belum pernah menerapkan *e-learning*, yang kadang-kadang menerapkan 22% dan yang sering menerapkan sebanyak 8%. Kemungkinan mereka yang pernah menerapkan *e-learning* karena pengalamannya saat kuliah atau belajar secara mandiri.

Efektivitas rumusan kebijakan *e-learning* di SD juga dapat dilihat dari seberapa banyak guru yang mengerti adanya kebijakan tersebut dan seberapa banyak guru yang melaksanakan

kebijakan. Dilihat dari seberapa banyak guru SD mengerti adanya kebijakan *e-learning* berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 94% responden (5.919 orang) menyatakan tahu adanya kebijakan tersebut dan hanya 6% (360 orang) responden yang tidak tahu. Sebanyak 77% menjawab kebijakan tersebut berasal dari kebijakam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama berupa Surat Edaran. Sedangkan kebijakan terbesar (58%) yang diketahui oleh responden mayoritas berupa SE Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa guru-guru SD telah mengetahui adanya kebijakan dan mengerti isinya.

Efektivitas rumusan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat juga dapat dilihat dari dukungan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Provisi/Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dan otoritas penyenggara pendidikan di daerah juga mendukung implemententasi *e-learning* ini. Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson terhadap 15 dokumen kebijakan tampak bahwa dokumen yang digunakan saling terkait. Dengan menggunakan *Cluster Analysis* diperoleh nilai Korelasi Pearson antara 0,13 hingga 0,77. Dengan demikian semua dokumen yang digunakan memiliki korelasi positif mendukung kebijakan satu dengan yang lain. Kredibilitas dokumen juga dianalisis dengan *Word Query* yang hasilnya menunjukkan bahwa kata-kata yang paling banyak digunakan sesuai dengan kebijakan pendidikan. Kata terbanyak yang ditemukan adalah “pendidikan” sebanyak 398 kata, kata “Indonesia” sebanyak 317 kata, kata “internet” sebanyak 267 kata, kata “jaringan” sebanyak 228 kata, dan kata “pembelajaran” sebanyak 135 kata seperti tampak pada gambar 1. Artinya dokumen yang digunakan kredibel dan relevan dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Kesimpulan dari analisis dokumen menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Darah, dan Kementerian Agama semuanya mendukung kebijakan *e-learning* guna mencegah

Melihat kenyataan bahwa para guru SD belum pengalaman menerapkan e-learning dan secara mendadak mayoritas guru menerapkannya maka tidaklah berlebihan jika banyak pihak mempertanyakan kualitasnya.

Kualitas implementasi kebijakan *e-learning* dapat dilihat dari seberapa baik guru melaksanakan *e-learning* di kelasnya masing-masing. Baik atau tidaknya kualitas pelaksanaan *e-learning* tergantung pada kualitas lingkungan belajar. Kualitas lingkungan belajar tersebut akan menentukan kualitas interaksi siswa dengan siswa lain, interaksi siswa dengan guru, interaksi konsep yang telah dikuasai siswa dengan konsep baru, dan interaksi siswa dengan materi yang akan diberikan guru.

Agar *e-learning* memberi pengaruh positif terhadap perilaku dan hasil belajar siswa maka perlu didesain *e-learning* yang efektif. Menurut (Anderson dan Elloumi, 2008: 25) komponen *e-learning* yang efektif ada 4 hal yaitu kesiapan siswa, aktivitas pembelajaran terkait dengan hal-hal praktis, adanya interaksi siswa, dan transformasi hasil belajar pada kehidupan sehari-hari. Menurut (Buzzetto-More, 2007: 35), lingkungan *e-learning* yang diperlukan adalah kemampuan siswa, dukungan sumber daya, materi, metode, penilaian, dan hasil belajar yang diinginkan. Maka dalam menganalisis kualitas implementasi *e-learning* ini akan dibahas aktivitas pembelajaran yang mencakup media, metode, interaksi, dan penilaian.

Aktivitas *e-learning* di madrasah dalam situasi darurat Covid-19 ini memang tidak bisa dikatakan sepenuhnya *online*. Selain masalah ketersediaan perangkat *e-learning* untuk guru dan siswa, juga ada masalah akses internet, dan kemampuan guru dan siswa dalam menggunakan kanal *e-elearning*. Berdasarkan jawaban responden sebanyak 47% responden (2.979 orang) melaksanakan pembelajaran dengan moda *online*, 11% responden (662 orang) secara *offline*, dan 42% responden (2.638 orang) lainnya menggunakan gabungan *online* dan *offline*.

Kualitas implementasi *e-learning* juga dapat dilihat dari media yang digunakan. Berdasarkan media yang digunakan dalam pembelajaran selama masa Covid-19 ini paling banyak guru SD menggunakan media teks yaitu sebesar 57%, media audio visual sebesar 35%, media visual yaitu 6%, dan media audio 2%. Hal tersebut sesuai dengan *platform* yang digunakan guru untuk mendukung proses pembelajaran yaitu 95% menggunakan aplikasi *WhatsApp*. Dalam memilih *platform* ini guru boleh memilih lebih dari satu aplikasi. Aplikasi *WhatsApp* paling efektif untuk mengkomunikasikan pesan dalam bentuk gambar maupun teks. Hasil penelitian ini senada dengan temuan KPAI dan FSGI yang menyatakan bahwa 83,4% guru menggunakan medsos (*WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram*) dalam pembelajaran di rumah secara *e-learning* (KPAI, 2020)².

Temuan Pemerintah juga menunjukkan hasil yang mirip (Kemdikbud, 2020³: 13) bahwa *WhatsApp* paling banyak digunakan oleh para guru yang disurvei yaitu sebesar 42%, telepon atau sms 17%, *platform* kelas maya 16%, *video conference* 11%, dan sisanya dengan menggunakan email, *google form*, atau mengunjungi siswa ke rumah. Senada dengan temuan Kemdikbud tersebut adalah temuan KPAI yang menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan menggunakan aplikasi pesan singkat 87,2%, *zoom meeting* 20,2%, *video call WhatsApp* 7,6%, dan telepon 5,2% (CNN Indonesia, 2020).

Masih banyaknya guru yang menggunakan media visual dan *platform e-learning* berbasis teks maka tidak bisa terjadi interaksi siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan materi secara maksimal. Artinya proses pembelajaran tidak terjadi interaksi secara dua arah dan berbagai arah. Kesimpulan ini juga senada dengan kesimpulan Kemdikbud yang menyatakan bahwa belum banyak guru yang melaksanakan pembelajaran secara interaktif (Kemdikbud, 2020², 24).

Pilihan media dan *platform* dalam pembelajaran di SD ini mempengaruhi metode yang digunakan oleh para guru. Walaupun kebanyakan guru menggunakan lebih dari satu

metode, namun kenyataannya 96% guru memilih menggunakan metode penugasan dalam pembelajaran. Metode penugasan paling banyak digunakan oleh guru juga ditemukan oleh otoritas pendidikan (Kemdikbud, 2020³, 12) yaitu sebesar 25%. Temuan ini sama dengan hasil survey FSGI dan KPAI yang mengemukakan bahwa aktivitas *e-learning* dilakukan dengan mengumpulkan pekerjaan rumah dilakukan oleh 58,8% guru responden, bahwa pembelajaran diakhiri dengan memberikan tugas yang berat dilakukan oleh 29,6% guru (KPAI, 2020)¹. Survey KPAI juga melaporkan bahwa 73,2% siswa merasa berat mengerjakan tugas, hanya 26,8% saja siswa yang mengaku tidak berat mengerjakan tugas.

Berdasarkan pelaksanaan pembelajaran tersebut maka Kemendikbud juga menyatakan bahwa pembelajaran ini belum interaktif. Kesimpulan yang sama diberikan oleh KPAI dan FSGI berdasarkan hasil surveynya yang menunjukkan 79,9% siswa mengaku tidak ada interaksi antara guru dan siswa seperti guru menjelaskan materi atau tanya jawab antara guru dan siswa. Yang terjadi hanyalah guru memberikan tugas dan menagih tugas (KPAI, 2020)².

Pilihan media, *platform*, dan metode pembelajaran mempengaruhi pilihan guru dalam menggunakan alat evaluasi. Penelitian terhadap guru SD ini mengungkap bahwa walaupun guru juga menggunakan lebih dari satu bentuk evaluasi, hasilnya paling banyak yaitu 61% guru memilih evaluasi terstulis dan disusul dengan evaluasi portfolio yaitu mengirimkan hasil belajar anak kepada gurunya secara *online* atau *offline*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa guru masih mengejar ketuntasan materi pelajaran yang artinya bertentangan dengan SE No.4/2020 Mendikbud bahwa proses pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini tidak harus mengejar ketuntasan pembelajaran.

Pilihan media, *platform*, metode, evaluasi, dan rendahnya interaksi yang terjadi dalam *e-learning* berdampak pada kesenangan siswa dalam belajar. Survey KPAI menunjukkan sebanyak 76,7 % siswa merasa tidak senang belajar dari rumah, dan hanya 23,3% saja yang merasa senang (CNN Indonesia, 2020). Survey lain yang dilakukan Forum Anak Nasional

(FAN) sebagaimana diungkap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), menunjukkan sebanyak 58% anak merasa tidak senang menjalani belajar di rumah pada masa pandemi Covid-19. Alasannya utamanya adalah karena anak-anak sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya (Mashabi, 2020).

Interaksi dalam *e-learning* akan terjadi efektif bila terjadi pada tiga tingkatan yaitu interaksi siswa dengan konsep, interaksi siswa dengan tugas, dan interaksi siswa dengan orang lain baik guru maupun siswa lain (Palloff dan Pratt, 2002: 52). Hal ini sesuai dengan pendapat (Juwah, 2006: 10). bahwa terdapat tiga interaksi siswa yaitu interaksi dengan konsep, interaksi dengan tugas, dan interaksi dengan orang lain yaitu guru dan siswa lainnya. Interaksi siswa dengan konsep adalah kontak siswa dengan konseptualisasi yang dimiliki sebelumnya. Sedangkan interaksi siswa dengan tugas adalah penerapan konsep baru ke dalam tugas yang diberikan guru. Sementara itu interaksi siswa dengan orang lain adalah penciptaan atau pengujian konsep baru dengan melakukan percakapan dengan guru dan siswa lain.

Interaksi dalam pembelajaran akan maksimal jika guru memilih media dengan tepat. Media audio visual adalah yang memungkinkan terjadinya interaksi secara maksimal. Media audio visual seperti computer interaktif maupun CD interaktif akan membantu motorik anak menjadi lebih peka dan terasah (Asilestari, 2016). Penelitian lain mengemukakan bahwa terdapat interaksi antara media pembelajaran digital dan kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar (Panjaitan, Yetti, dan Nurani, 2020). Faktor interaksi adalah salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pembelajaran *e-learning* (Rostaminezhad, dkk, 2013). Berdasarkan kondisi ini maka para guru SD hendaknya didorong untuk menggunakan media interaktif seperti aplikasi *video conference* yang memungkinkan siswa dan guru saling berinteraksi.

SIMPULAN DAN SARAN

Rumusan kebijakan belajar di rumah dengan *e-learning* di SD telah dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari telah terpenuhinya tiga unsur pokok kebijakan yaitu masalah, tujuan, dan pemecahan masalah. Dilihat dari tujuan dikeluarkannya kebijakan tentang *e-learning* telah memenuhi tujuan regulatif atau deregulatif serta dinamisasi atau stabilitasi. Kebijakan *e-learning* telah dikomunikasikan dengan baik kepada guru SD sehingga sebagian besar guru SD mengerti dan melaksanakannya. Selain itu kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat telah mendapatkan dukungan yang penuh dari Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Implementasi kebijakan belajar di rumah dengan *e-learning* di SD belum efektif dilihat dari media yang digunakan yang sebagian besar menggunakan media visual berupa teks, metodenya penugasan yang memberatkan siswa, interaksinya belum terjadi secara maksimal dalam tiga tingkatan, dan evaluasinya mayoritas secara tertulis. Apalagi sebagai besar murid merasa terbebani tugas dan tidak senang atau bosan selama belajar di rumah dengan *e-learning* ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan kepada peneliti lain untuk melakukan penelitian terkait kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang digunakan membangun prasarana dan sarana pendukung implementasi *e-learning*. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga direkomendasikan untuk menyusun kebijakan terkait implementasi *e-learning* secara terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, T. and Elloumi. (2008). F. *The theory and practice of online learning*. Athabasca University Press. ISBN 1897425082.

Arifin, F. and Herman, T. (2017). The Influence of E-Learning Model Web Enhanced Course to Conceptual Understanding and Self Regulated Learning in Mathematics for

- Elementary School Students. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 4, n. 1, p. 45-52.
- Asilestari, P. (2016). Komputer Interaktif sebagai Media Pengajaran Bahasa Inggris pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2, n. 1, p. 55-62,.
- Buzzetto-More, N. A. (2007). *Advanced principles of effective e-learning*. Informing Science. ISBN 1932886028.
- CNN Indonesia. (2020). *Survei KPAI: Guru Tak Interaktif selama Belajar dari Rumah*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200427160228-20-497716/survei-kpai-gurutak-interaktif-selama-belajar-dari-rumah> diakses 5 Mei 2020
- Fauzan, U. dan Pimada, L. H. (2018). ICT-Based Teaching of English at Madrasah Aliyah in Kalimantan. *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society*, 5, n. 2, p. 193-211.
- Huang, R.; Spector, J. M.; and Yang, J. (2019). *Educational Technology: A primer for the 21st century*. Springer. ISBN 9811366438.
- Ibrahim, D. S. dan Suardiman, S. P. (2014). Pengaruh penggunaan e-learning terhadap motivasi dan prestasi belajar matematika siswa SD Negeri Tahunan Yogyakarta. *Jurnal Prima Edukasia*, 2, n. 1, p. 66-79.
- Istiyani, N.; Nyoto, R. D.; dan Muhandi, H. (2020). Aplikasi Learning Management System pada Jenjang Madrasah Aliyah. *JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi)*, 8, n. 1, p. 105-115.
- Juwah, C. (2016). *Interactions in online education: Implications for theory and practice*. Routledge. ISBN 1134247494.
- Kemendikbud. (2020)¹. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
- Kemendikbud. (2020)². Analisis Survey Cepat Pembelajaran Di Rumah Dalam Masa Pencegahan Covid 10, https://Drive.Google.Com/Drive/Folders/1cbytwcueszrev_Aynxpiyy1jt8ncsgq1 Diakses 23 April 2020).
- Kemendikbud. (2020)³. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan.
- KPAI-Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020)¹. *Sebab Siswa Semakin Termarginalkan Saat Belajar Di Rumah*. <https://www.kpai.go.id/berita/sebab-siswa-semakin-termarginalkan-saat-belajar-dari-rumah> diakses 5 Mei 2020.
- KPAI-Komisi Perlindaungan Anak Indonesia. (2020)². *KPAI-FSGI: 53% Guru Berorientasi Kurikulum Saat Belajar dari Rumah*. <https://www.kpai.go.id/berita/sebab-siswa-semakin-termarginalkan-saat-belajar-dari-rumah> diakses 5 Mei 2020.
- Lubis, M. (2016). Peluang Pemanfaatan Pembelajaran Berorientasi Teknologi Informasi di Lingkup Madrasah (Mempersiapkan Madrasah Berwawasan Global). *Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 1, n. 2, p. 147-153.
- Madjid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Samudera Biru.

- Mashabi, S. (2020). "Survei Kemen PPPA: 58 Persen Responden Tak Senang Belajar dari Rumah". <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/11/13511231/survei-kemen-pppa-58-persen-responden-tak-senang-belajar-dari-rumah> diakses 5 Mei 2020.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Palloff, R. M. dan Pratt, K. (2002). *Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching*. John Wiley & Sons. ISBN 0787959960.
- Panjaitan, N. Q.; Yetti, E.; dan Nurani, Y. (2020). Pengaruh Media Pembelajaran Digital Animasi dan Kepercayaan Diri terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, n. 2, p. 588-596.
- Pribowo, F. S. P. (2017). Analisis Kemampuan Guru SD Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 1, n. 1.
- Pribowo, F. S. P., (2020). Persepsi Guru Sd Muhammadiyah Terhadap Penggunaan Gawai Dalam Pembelajaran Di Kelas. *Proceeding Universitas Muhammadiyah Surabaya*, journal.um-surabaya.ac.id.
- Rayes, A. and Salam, S. (2017). *Internet of things-from hype to reality: the road to digitization*. Switzerland AG, Springer Nature. ISBN 978-3-319-99516-8.
- Rostaminezhad, M.; Mozayani, N.; Norozi, D.; and Iziy, M. (2013). Factors related to e-learner dropout: Case study of IUST elearning center. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 83, p. 522-527.
- Sholikah dan Septia, N. I. (2019). Aplikasi Telegram (Tele-Edukasi) Dalam Pembelajaran IPA Di Madrasah Ibtidaiyah. *PREMIERE*, 1, n. 1, p. 37-48.
- Sobron; Bayu; Rani; dan Meidawati. (2019). Persepsi Siswa Dalam Studi Pengaruh Daring Learning Terhadap Minat Belajar IPA. *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 1, n. 2, p. 30-38.
- Sofi, E. (2017). Pembelajaran Berbasis E-Learning Pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah Negeri. *Tanzhim*, 1, n. 01, p. 49-64.
- Susanto, H.; Widiartin, T.; dan Pratama, F. H. S. (2016). Aplikasi Pembelajaran Berbasis Android (E-Learning) Di MA Daruttaqwa Gresik. *Melek IT Information Technology Journal*, 2, n. 2.
- Tilaar, H. dan Nugroho, R. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wardana dan Zakiah. (2019). Information Technology-Based Learning (Media Development Applications Quizlet on students in MI DDI Seppange Bone). *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4, n. 1, p. 37-52.

Wijoyo, T. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Aplikasi Lectora Inspire Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Mts Kelas VIII. *Lisanul'Arab: Journal of Arabic Learning and Teaching*, 5, n. 1.